

KONSEP AKUNTABILITAS DALAM GOOD GAVERNANCE: ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN MODERN

M. Arif Hakim¹, Ibnu Elmi AS Pelu²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Palangkaraya

marifhakim91@gmail.com¹, ibnuelmi@uin-palangkaraya.ac.id²

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published: 25 July 2026

Keywords:

akuntabilitas, good governance, pemikiran Islam, Ibnu Khaldun, pemerintahan modern

accountability, good governance, Islamic thought, Ibn Khaldun, modern government



© Author(s) 2026
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akuntabilitas dalam perspektif pemikiran Islam melalui gagasan Ibn Khaldun serta mengkaji implikasinya terhadap konsep good governance dalam sistem pemerintahan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode narrative literature review yang berfokus pada analisis terhadap karya klasik Muqaddimah sebagai sumber primer serta berbagai literatur akademik sebagai sumber sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas dalam pemikiran Ibnu Khaldun tercermin melalui beberapa prinsip utama, yaitu keadilan sebagai dasar legitimasi kekuasaan, amanah kekuasaan dan tanggung jawab moral pemimpin, konsep asabiyyah sebagai fondasi stabilitas sosial dan politik, serta pentingnya integritas dan moralitas penguasa dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai utama dalam konsep good governance modern, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya memiliki relevansi historis dalam kajian politik Islam, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

This study aims to analyze the concept of accountability from the perspective of Islamic political thought through the ideas of Ibn Khaldun and examine its implications for the concept of *good governance* in modern governmental systems. This research employs a qualitative approach using a *narrative literature review* method that focuses on the analysis of the classical work *Muqaddimah* as the primary source, along with various academic literatures as secondary sources. The data were analyzed using *content analysis* to identify key concepts related to accountability in Ibn Khaldun's thought. The findings reveal that the concept of accountability in Ibn Khaldun's perspective is reflected through several main principles, namely justice as the basis of political legitimacy, the notion of power as a trust accompanied by moral responsibility of leaders, the concept of *asabiyyah* as the foundation of social and political stability, and the importance of integrity and moral conduct of rulers in sustaining governance. These principles are consistent with the fundamental values of modern *good governance*, including transparency, accountability, and governmental responsibility toward society. This study demonstrates that Ibn Khaldun's thought not only holds historical significance in Islamic political studies but also offers theoretical contributions to the development of accountable governance systems oriented toward public welfare.

PENDAHULUAN

Tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab semakin menguat dalam dinamika politik dan administrasi publik kontemporer. Berbagai persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah menunjukkan bahwa akuntabilitas masih menjadi tantangan utama dalam praktik tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Laporan *Worldwide Governance Indicators* menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di banyak negara berkembang masih menghadapi persoalan serius dalam aspek akuntabilitas publik dan pengendalian korupsi.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang mampu menjamin transparansi serta tanggung jawab penguasa kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, konsep *good governance* menjadi kerangka penting dalam memperbaiki praktik pemerintahan melalui prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, supremasi hukum, serta akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam konsep tersebut karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara. Tanpa adanya akuntabilitas yang kuat, kekuasaan berpotensi disalahgunakan sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial serta melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Konsep akuntabilitas dalam *good governance* telah menjadi perhatian penting dalam berbagai penelitian mengenai administrasi publik dan tata kelola pemerintahan.

Literatur menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan rasional. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pemerintahan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.² Selain itu, berbagai studi juga menegaskan bahwa transparansi, kompetensi aparatur, serta sistem pengawasan yang efektif merupakan faktor penting yang mendukung terwujudnya praktik *good governance* dalam pemerintahan modern.³ Penelitian lain menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance*

¹ World Bank, "Worldwide Governance Indicators Report," *World Bank* (Washington DC), 2023, 14.

² Abdul Jabar dan Evi Yuniarni, *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan Good Governance*, 4 (2025): 134.

³ Anggy Saskia dkk., "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Aparatur Terhadap Good Governance Pada Dana Kelurahan di Tingkat Kecamatan," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang 5*, no. 1 (2025): 92, <https://doi.org/10.31933/sj5gap68>.

tidak hanya terbatas pada sektor publik, tetapi juga memiliki relevansi dalam pengelolaan organisasi dan sektor privat yang menuntut akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya.⁴

Namun demikian, sebagian besar kajian mengenai akuntabilitas masih berfokus pada pendekatan administratif dan institusional yang menitikberatkan pada mekanisme pengawasan birokrasi dan kebijakan publik. Pendekatan tersebut sering kali kurang memberikan perhatian pada dimensi etika dan moral yang menjadi fondasi penting dalam praktik pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam perspektif pemikiran Islam, konsep akuntabilitas sebenarnya telah lama menjadi bagian dari tradisi intelektual yang menekankan tanggung jawab moral pemimpin terhadap masyarakat. Kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab demi menjaga kemaslahatan publik.⁵ Perspektif ini menempatkan nilai-nilai etika seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai dasar dalam praktik pemerintahan yang baik.

Salah satu pemikir Muslim yang memberikan kontribusi penting dalam kajian mengenai hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan stabilitas negara adalah Ibn Khaldun. Melalui karya monumentalnya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu negara sangat bergantung pada kemampuan penguasa dalam menegakkan keadilan serta menjaga kesejahteraan masyarakat.⁶ Ia menegaskan bahwa ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan kemunduran dan keruntuhan suatu negara. Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi dengan konsep pembangunan berkelanjutan serta etika pemerintahan modern karena menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam kepemimpinan.⁷ Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun dapat dipahami sebagai salah satu kerangka konseptual yang memberikan perspektif normatif dalam memahami akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian mengenai *good governance* dan pemikiran politik Islam telah banyak dilakukan, namun masih terdapat kesenjangan kajian yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Penelitian Aryansa tentang implementasi prinsip *good governance* dalam perspektif *fiqh siyasah* lebih berfokus pada aspek normatif pemerintahan Islam secara umum dan belum menjadikan Ibn Khaldun sebagai kerangka utama dalam membahas akuntabilitas pemerintahan. Penelitian Wilujeng mengenai *good governance* berdasarkan *fiqh siyasah* juga masih menitikberatkan pada pendekatan hukum Islam normatif tanpa mengaitkan konsep akuntabilitas

⁴ Farisna Marhadila dkk., *Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance dalam Sektor Publik dan Privat*, 01, no. 04 (2024): 51.

⁵ Ibnu Rusyidi, "Good Governance According To Islamic Perspective," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 4 (2023): 118, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727>.

⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah: An Introduction to History* (Princeton University Press, 2005), 289.

⁷ Muchammad Chafidz Muchlisin, *Relevansi Dimensi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs) dalam Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun TheRelevanceofSustainableEconomic DevelopmentDimensions(SDGs)inthePerspective ofIbnKhaldun'sThought*, t.t., 85.

dengan pemikiran Ibnu Khaldun seperti keadilan, amanah kekuasaan, dan *asabiyyah*. Sementara itu, penelitian Jabar dan Yuniarni membahas akuntabilitas dalam pelayanan publik modern, tetapi kajiannya lebih berorientasi pada administrasi publik dan belum menghubungkannya dengan perspektif politik Islam klasik. Penelitian Muchlisin dan Mugiyati tentang relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap pembangunan berkelanjutan lebih menekankan aspek ekonomi dan sosial, sedangkan penelitian Zakiyah dan Al-Ayyuubi berfokus pada etika bisnis Ibnu Khaldun dalam konteks *sustainable development goals* sehingga belum mengkaji akuntabilitas pemerintahan secara spesifik. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa masih terbatas kajian yang secara khusus menghubungkan konsep akuntabilitas dalam *good governance* dengan pemikiran politik Ibnu Khaldun serta implikasinya terhadap pemerintahan modern. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai landasan teoritis dalam memahami akuntabilitas pemerintahan tidak hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai prinsip moral dan etika politik dalam tata kelola negara modern.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip akuntabilitas yang terkandung dalam pemikiran Ibnu Khaldun serta menjelaskan relevansi gagasan tersebut dalam konteks tata kelola pemerintahan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian mengenai hubungan antara pemikiran politik Islam dan konsep tata kelola pemerintahan modern, sekaligus menawarkan perspektif normatif yang dapat memperkuat praktik akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, integritas, dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep akuntabilitas dalam perspektif pemikiran Ibn Khaldun serta implikasinya terhadap konsep *good governance* dalam pemerintahan modern. Penelitian literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, baik berupa karya klasik maupun literatur akademik kontemporer, dengan menempatkan Muqaddimah sebagai sumber primer dan berbagai artikel jurnal serta buku ilmiah sebagai sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan kajian pustaka yang berkaitan dengan konsep akuntabilitas, *good governance*, dan pemikiran politik Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi gagasan, konsep, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan secara sistematis berbagai gagasan yang terdapat dalam literatur sehingga dapat ditemukan hubungan konseptual antara pemikiran Ibnu Khaldun dengan praktik tata kelola

pemerintahan modern. Metode studi literatur pada dasarnya merupakan teknik penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai objek kajian utama guna memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam mengenai suatu fenomena penelitian.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan sebagai Dasar Akuntabilitas dan Legitimasi Kekuasaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam membangun legitimasi pemerintahan dan menjaga keberlangsungan negara. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa prinsip keadilan akan melahirkan ketidakstabilan sosial dan politik. Ketidakadilan yang dilakukan penguasa, seperti penindasan terhadap rakyat, eksploitasi ekonomi, maupun penyalahgunaan wewenang, akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan melemahnya solidaritas sosial yang menjadi penopang utama kekuatan negara.

Berdasarkan hasil analisis, konsep keadilan dalam pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai kebutuhan struktural dalam sistem pemerintahan. Keadilan menjadi syarat penting bagi terciptanya hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pemerintah mampu menjalankan kebijakan secara adil, masyarakat akan memberikan dukungan terhadap kekuasaan sehingga legitimasi politik dapat dipertahankan. Sebaliknya, ketidakadilan akan melahirkan ketidakpuasan sosial yang berpotensi memicu konflik dan mempercepat kemunduran negara.

Dalam konteks akuntabilitas pemerintahan, pemikiran Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai pelaporan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang bertindak adil akan memperoleh kepercayaan publik, sedangkan pemerintah yang bertindak represif akan kehilangan legitimasi sosialnya.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan yang dikemukakan Ibnu Khaldun memiliki relevansi dengan prinsip good governance dalam pemerintahan modern. Salah satu indikator utama good governance adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah yang akuntabel harus mampu memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan secara adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan pemahaman bahwa stabilitas politik tidak hanya ditentukan

⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

oleh kekuatan militer atau kelembagaan negara, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial.

Selain itu, keadilan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat. Ketika pemerintah mampu memenuhi hak-hak masyarakat secara proporsional, maka hubungan antara penguasa dan rakyat akan berjalan harmonis. Namun, apabila pemerintah lebih mengutamakan kepentingan elite politik dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat, maka legitimasi kekuasaan akan mengalami penurunan secara bertahap. Dengan demikian, keadilan dalam pemikiran Ibnu Khaldun dapat dipahami sebagai inti dari akuntabilitas pemerintahan yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam mempertahankan stabilitas politik dan sosial.

Amanah Kekuasaan dan Moralitas Pemimpin

Temuan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memandang kekuasaan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dalam perspektif ini, penguasa tidak hanya berfungsi sebagai pemegang otoritas politik, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan publik yang wajib menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab. Kekuasaan bukanlah alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa akuntabilitas dalam pemikiran Ibnu Khaldun memiliki dimensi etika yang sangat kuat. Seorang pemimpin harus memiliki integritas moral dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi akan kehilangan kepercayaan masyarakat karena kekuasaan tersebut tidak lagi dipandang sebagai representasi kepentingan bersama. Dalam kondisi demikian, legitimasi politik akan melemah dan stabilitas pemerintahan menjadi rentan terhadap konflik sosial.

Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa kemunduran suatu negara sering kali diawali oleh perubahan karakter pemimpinnya. Ketika penguasa mulai hidup berlebihan, mengutamakan kepentingan pribadi, dan menjauh dari nilai keadilan, maka pemerintahan akan mengalami kemerosotan moral. Kemerosotan tersebut kemudian berdampak pada melemahnya sistem pemerintahan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, moralitas pemimpin menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan negara.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep amanah dalam pemikiran Ibnu Khaldun memiliki hubungan erat dengan prinsip kepemimpinan etis dalam tata kelola pemerintahan modern. Dalam konsep good governance, integritas pemimpin menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Pemimpin yang memiliki

moralitas tinggi akan lebih mampu menjalankan kebijakan secara objektif dan mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi.

Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat, maka stabilitas sosial dan politik akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, apabila masyarakat melihat adanya korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kekuatan sistem birokrasi atau aturan hukum, tetapi juga pada kualitas moral pemimpinnya. Akuntabilitas pemerintahan harus dibangun di atas nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini menunjukkan bahwa moralitas pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik dan keberlangsungan negara.

Asabiyyah dan Stabilitas Pemerintahan

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep *asabiyyah* yang dikemukakan Ibnu Khaldun memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan. *Asabiyyah* dipahami sebagai solidaritas sosial atau rasa kebersamaan yang menjadi kekuatan kolektif dalam menopang keberlangsungan suatu negara. Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan suatu pemerintahan sangat bergantung pada dukungan sosial masyarakat. Dukungan tersebut hanya dapat dipertahankan apabila pemerintah menjalankan kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa solidaritas sosial akan semakin kuat ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah memperhatikan kepentingan mereka. Dalam kondisi tersebut, masyarakat akan memberikan loyalitas dan dukungan terhadap pemerintah sehingga stabilitas politik dapat terjaga. Sebaliknya, apabila pemerintah bertindak sewenang-wenang, melakukan penindasan, atau mengabaikan kesejahteraan rakyat, maka solidaritas sosial akan melemah. Melemahnya *asabiyyah* akan membuka peluang munculnya konflik sosial dan ketidakstabilan politik.

Dalam konteks ini, akuntabilitas memiliki fungsi penting sebagai mekanisme untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang akuntabel akan lebih mudah memperoleh kepercayaan publik karena masyarakat melihat adanya tanggung jawab dalam penggunaan kekuasaan. Sebaliknya, ketidakmampuan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan publik akan menyebabkan hilangnya dukungan sosial terhadap pemerintahan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep *asabiyyah* memiliki relevansi dengan teori legitimasi politik dalam pemerintahan modern. Legitimasi tidak hanya diperoleh melalui kekuatan hukum atau kekuasaan formal, tetapi juga melalui dukungan masyarakat. Dukungan tersebut lahir dari kepercayaan bahwa pemerintah menjalankan kekuasaan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu, konsep *asabiyyah* juga memperlihatkan bahwa stabilitas negara tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial antara penguasa dan masyarakat. Ketika pemerintah mampu membangun solidaritas sosial melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, maka ketahanan politik negara akan semakin kuat. Sebaliknya, kebijakan yang diskriminatif atau tidak adil akan memicu perpecahan sosial yang mengancam keberlangsungan pemerintahan.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan modern. Prinsip keadilan, amanah kekuasaan, moralitas pemimpin, dan *asabiyyah* menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan mekanisme administratif, tetapi juga dengan nilai-nilai sosial dan etika yang mendasari praktik pemerintahan. Perspektif ini menegaskan bahwa keberhasilan good governance sangat dipengaruhi oleh integritas pemimpin, keadilan kebijakan publik, dan kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas dalam pemikiran Ibn Khaldun memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *good governance* dalam pemerintahan modern. Melalui analisis terhadap Muqaddimah, ditemukan bahwa prinsip keadilan, amanah kekuasaan, *asabiyyah*, serta moralitas pemimpin merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa keadilan dan tanggung jawab akan melemahkan legitimasi politik serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Konsep tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan mekanisme administratif, tetapi juga menyangkut dimensi etika dan tanggung jawab moral dalam penggunaan kekuasaan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dapat dijadikan kerangka normatif dalam memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran Ibnu Khaldun perlu diintegrasikan dalam pengembangan kebijakan publik dan etika kepemimpinan dalam pemerintahan modern. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai penerapan konsep akuntabilitas Ibnu Khaldun dalam praktik kebijakan publik atau

M. Arif Hakim, Ibnu Elmi AS Pelu: Konsep Akuntabilitas dalam Good Governance: Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Modern

sistem pemerintahan kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi pemikiran tersebut dalam tata kelola negara modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, M., & Rohman, P. S. (2024). Ontologi Ekonomi Islam Ibn Khaldun: Sebuah Pendekatan Holistik. *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 7(2).
- Aryansa. (2023). Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam sistem pemerintahan di Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1).
- Diaty, R., Arisa, A., Lestari, N. C. A., & Ngilimun, N. (2022). Implementasi aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pandohop*, 2(2), 38-46.
- Evanne, L., Adli, A., & Ngilimun, N. (2021). Dampak game online terhadap motivasi belajar dan keterampilan komunikasi interpersonal mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 8(1), 55-62.
- Jabar, A., & Yuniarni, E. (2025). *Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik untuk mewujudkan good governance* (Vol. 4).
- Ipan Nurhidayat. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52.
- Latifah, L., Ngilimun, N., Setiawan, M. A., & Harun, M. H. (2020). Kecakapan Behavioral Dalam Proses Pembelajaran PAI Melalui Komunikasi Interpersonal: Behavioral Proficiency In The PAI Learning Process Through Interpersonal Communication. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 5(2), 36-42.
- Khaldun, I. (2005). *Muqaddimah: An introduction to history*. Princeton University Press.
- Marhadila, F., Firdaus, F. P., Kadilla, I. D. R., & Apriliani, P. F. (2024). *Optimalisasi pentingnya konsep good governance dalam sektor publik dan privat*, 1(4).
- Muchlisin, M. C. (t.t.). *Relevansi dimensi pembangunan ekonomi berkelanjutan (SDGs) dalam perspektif pemikiran Ibnu Khaldun: The relevance of sustainable economic development dimensions (SDGs) in the perspective of Ibn Khaldun's thought*.
- Muis, dkk. Muhammad Amirul Haq. (2014). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik, Government. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 2,
- Ngilimun, S. M. (2017). Strategi pembelajaran. *Yogyakarta Penerbit Parama Ilmu*.
- Ngilimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Osborne & Gaebler. 1992. *Reinventing Government: How to Entrepreneur Sprit In transforming the public sector Schoollhouse to Statehouse. City hall to Pentagon* Reading MA, Addison Wisley.
- Rusyidi, I. (2023). Good governance according to Islamic perspective. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(4), 1001–1007.
- Sandi, Boy (2024) *Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Sekolah Ibnu Khaldun*. Remo. Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- Saskia, A., Setiawan, A. B., & Anwar, S. (2025). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan kompetensi aparatur terhadap good governance pada dana kelurahan di tingkat kecamatan. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 5(1), 117–130.
- Stoker, G.1997. *Governance as Theory: Five Proposition*. Unesco

M. Arif Hakim, Ibnu Elmi AS Pelu: Konsep Akuntabilitas dalam Good Governance: Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Implikasinya Terhadap Pemerintahan Modern

Wilujeng, W. (2025). Good governance dalam pemerintahan Indonesia: Analisis normatif berdasarkan fikih siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 203–214.

World Bank. (2023). *Worldwide governance indicators report*. World Bank.

Zakiah, F. (t.t.). *The relevance of Ibn Khaldun's concept of business ethics to the SDGs*.

Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.